Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal
Volume 2, No. 2, Oktober 2019

EFEKTIFITAS PENGAWASAN DINAS KESEHATAN DALAM PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BONE

Andi Ni'mah Sulfiani

Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andi Djemma Palopo
Email: andi.nimah305@gmail.com

Abstrak

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang juga sangat menentukan tercapainya tujuan dari suatu organisasi. Fokus penelitian ini yaitu pada efektifitas pengawasan Dinas Kesehatan dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauhmana efektifitas pengawasan Dinas Kesehatan dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone. Tipe jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pengawasan Dinas Kesehatan dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone masih belum efektif, hal ini dilihat dari tingkat pengawasan yang rendah, tidak merata, dan tidak konsisten ditambah lagi masih terbatasnya sumber daya tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan luas cakupan wilayah Kabupaten Bone sehingga pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan yang ada dan kesemuanya itu berdampak kepada keefektifan pengawasan terhadap dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone. Adapaun saran yang dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Dinas Kesehatan dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone yaitu meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik oleh dinas kesehatan antar lintas sektor yang terlibat dalam pengawasan obat dan makanan serta pemerintah daerah setempat yaitu Dinasa Kesehatan harus mampu menyaring semua aspirasi baik itu kritikan maupun masukan dari masyarakat sehingga pengawasan obat dan makanan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Efektifitas, Pengawasan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang di mana dalam pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan urusan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan dan suplemen kesehatan program nasional, pengawasan ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan, pembinaan dan pengawasan industri (sarana produksi dan sarana distribusi), sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan obat, serta bahan baku alam yang terkait dengan kesehatan.

Badan POM dibentuk berdasarkan peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Badan POM. Berdasarkan peraturan tersebut dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Pada pasal 2 ayat (1) disebutkan pula bahwa Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sudah jelas peraturan-peraturan guna pengawasan terhadap obat dan makanan yang telah diatur tersebut.

Pada dasarnya penjualan obat dan makanan sangatlah membantu masyarakat sebab ia menfasilitasi penyediaan obat dan makanan yang berguna sebagai sumber pemenuhan akan penyembuhan, penguatan daya tahan tubuh dan sumber asupan gizi maupun tenaga dalam tubuh manusia.Namun demikian tentunya hal tersebut harus dibarengi dengan profesionalisme petugas bidang pengawasan obat dan makanan yang bertanggung jawab penuh dalam kegiatan pengawasan dengan meningkatkan sistem

pengawasan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkesinambungan terhadap segala macam obat dan makanan yang akan dan telah beredar di pasaran, penguatan regulasi dan kerja sama lintas sektor serta keterlibatan segenap masyarakat agar kualitas dan mutu obat dan makanan dapat terjamin keamanannya sehingga tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini sangat diperlukan mengingat masih banyak para pelaku yang kerap kali memperjual belikan obat dan makanan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya dalam penjualannya pada seseorang dengan tanpa adanya resep langsung dari dokter dan tidak mengetahui dengan jelas akan tujuan penggunaan obat yang dibelinya tersebut apakah aman atau tidak untuk digunakan. Begitu pula penjualan makanan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang seringkali lalai dalam memperhatikan kualitas dan mutu makanan yang diperjual belikan tersebut, baik adanya unsur kesengajaan maupun tidak sama sekali.

Begitu pentingnya pengawasan obat dan makanan tersebut maka dari itu Dinas Kesehatan Kabupaten Bone di bawah arahan dan koordinasi Badan POM pusat maupun provinsi selaku petugas kesehatan yang bertanggung jawab penuh dari segi farmasi dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan berbahaya, ilegal atau tidak memiliki izin edar, palsu, tidak layak konsumsi atau kadaluarsa oleh produsen, distributor maupun pelaku usaha baik obat dan makanan yang akan maupun telah beredar.

Persoalan yang timbul saat ini adalah realitas pelaksanaan tanggung jawab pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan.Hal ini berdasarkan pengakuan sejumlah masyarakat di beberapa daerah di Kabupaten Bone bahwa terdapat keluhan-keluhan yang dirasakan sejumlah masyarakat terkait dengan tingkat pengawasan yang rendah, belum optimal dalam pengawasan obat dan makanan yang dilakukan. Hal ini dilihat dari kurangnya komunikasi, informasi, dan edukasi yang diberikan oleh dinas kesehatan selaku pengawas berupa penyuluhan, sosialisasi, dan pembinaan kepada para pelaku usaha (produsen), distributor maupun pengguna (konsumen) terkait dengan obat dan makanan yang berbahaya, ilegal atau tanpa izin edar, dan kadaluarsa yang tidak sesuai aturan yang berlaku.Pengawasan yang dilakukan secara berkala, tidak menyeluruh dan merata, tidak objektif, tidak terintegrasi dan tidak tepat waktu sehingga dinilai masih belum optimal dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya di bidang pengawasan obat dan makanan. Berikut beberapa contoh kasus yang terjadi terkait dengan persoalan belum optimalnya pengawasan peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut :

Kasus penyitaan dan penangkapan oleh sejumlah aparat kepolisian terhadap sejumlah pelaku usaha penjual campuran terkait dengan produk obat-obatan ilegal yang tergolong obat G (Generik) yang diperjual belikan. Dari pengakuan salah seorang pelaku usaha yang dirazia tersebut bahwa sama sekali tidak ada informasi berupa pemberitahuan atau penyampaian oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone terkait dengan jenis obat-obatan yang termasuk obat golongan G yang ternyata tidak boleh diperjual belikan di toko-toko seperti miliknya, lantas mengapa kemudian petugas kepolisian tiba-tiba saja datang melakukan razia obat-obatan, penyitaan, bahkan penangkapan kepada mereka. Pada akhirnya sejumlah pemilik toko tersebut di pidana kurungan penjara selama kurang lebih empat bulan lamanya.

Kasus kematian seorang pelajar di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang mabuk dan hilang kendali akibat mengkonsumsi beberapa jenis obat-obatan keras atau memiliki kadar dosis yang cukup tinggi di salah satu apotek dekat rumahnya padahal tidak disertai dengan resep langsung dari dokter.

Berbagai fenomena di atas menunjukkan belum optimalnya pengawasan dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan tanggung jawab dan kewenangannya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bone.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Maleong 2005). Khususnya berkaitan dengan Efektivitas Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Peredaran Obat dan Makanan di Kabupaten Bone.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada 2 cara yaitu pertama data primer yaitu, data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap obyek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dari informan, yang kedua data sekunder yaitu, data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, tulisan-tulisan,dan kinerja yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong,2006). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan pada penelitian inidiantaranya meliputi :

1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK)
2. Seksi Kefarmasian Sumber Daya Kesehatan (SDK)
3. Pemilik Apotek
4. Pedagang Campuran
5. Tokoh Remaja
6. Tokoh Masyarakat

Teknik Analisis data

Sugiyono (2016), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (2014), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Efektifitas pengawasan Dinas Kesehatan dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone pada penelitian ini menggunakan indikator efektifitas pengawasan menurut Kreitner (Harahap 2015), yang meliputi integrasi, objektif, akurat, tepat waktu dan fleksibel, dengan mengacu terhadap pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bone. Dari hasil penelitian melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Integrasi

Pengawasan harus terintegrasi dengan keseluruhan sistem organisasi atau *built in control*. Adapun indikator yang mempengaruhi integrasi yakni tentang koordinasi dan komunikasi

Berikut hasil petikan wawancara dengan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bapak Drs. Fajar., M.Kes, beliau mengatakan bahwa :

"Kalau koordinasi ini kami memang selalu berkoordinasi langsung dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi di Makassar terutama dalam hal pengawasan obat dan makanan. Kalau Provinsi sendiri pasti berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat di Jakarta. Nah, program yang ada di Balai POM diintegrasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Jadi apa yang ada tentang program pengawasan peredaran obat dan makanan di Provinsi kemudian kami yang jalankan di Kabupaten. Jadi kegiatan yang kami lakukan ini sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM Provinsi terutama dalam hal pengawasan peredaran obat dan makanan".

Sementara itu petikan wawancara dengan Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Ibu Hasniah., S.Si., Apt., beliau mengatakan bahwa :

"Untuk kegiatan pengawasan peredaran obat dan makanan itu kami selalu berkoordinasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Biasanya kami bersama-sama juga turun langsung ke sarana untuk mengawasi, kalau misalnya obat itu kami langsung turun ke apotek dengan toko obat begitu juga di pasar-pasar tradisional".

Sesuai dengan penjelasan indikator dan petikan wawancara di atas maka dapat ditarik kesilmpulan bahwa untuk koordinasi Dinas

Kesehatan Kabupaten Bone baik dengan provinsi maupun pusat, antar pemerintah daerah, dinas terkait dengan aparat kepolisian itu sudah berlangsung dengan baik dalam pelaksanaan pengawasan peredaran obat dan makanan yang dilakukan.

Selain koordinasi untuk mengukur integrasi diperlukan komunikasi yang baik antara pihak yang terlibat. Berikut hasil petikan Wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, beliau mengatakan bahwa :

"Di dalam kegiatan pengawasan peredaran obat dan makanan kami itu ada yang dinamakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang langsung ke masyarakat. Dalam KIE itu dijelaskan mengenai obat, makanan dan kosmetik. Terus kami juga biasa kalau turun ke sarana-sarana itu biasa langsung memberikan informasi dan pembinaan langsung kepada masyarakat".

Berbeda halnya dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Drs. Ridwan Samad selaku Tokoh Masyarakat sekaligus orang tua dari penjual obat terlarang, beliau mengatakan bahwa :

"Sebenarnya mereka menjual obat yang tergolong daftar G itu sama sekali tidak mengetahui bahwa obat yang mereka jual itu termasuk dilarang, terlebih komunikasi, informasi, maupun edukasi yang sama sekali tidak ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Hal inilah yang menyebabkan kerugian yang berarti bagi keluarga kami".

Sesuai dengan penjelasan indikator dan beberapa petikan wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sebenarnya tetap melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait namun demikian belum merata dalam pelaksanaannya. Hal ini dilihat dari keluhan sejumlah masyarakat bahkan pelaku usaha yang kemudian dirugikan akibat komunikasi, edukasi, maupun informasi yang belum optimal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sehingga perlunya evaluasi dan perbaikan untuk dilakukan oleh dinas terkait.

Objektif

Sistem pengawasan harus menggunakan dan memberikan informasi yang objektif atau menyeluruh. Pengawasan obat dan makanan dilakukan secara merata dan menyeluruh pada segala komponen yang diawasi termasuk produsen, distributor dan konsumen, baik pengawasan yang dilakukan sebelum maupun setelah obat dan makanan beredar akan memperoleh hasil yang baik demikian pula sebaliknya.

Berikut hasil petikan wawancara yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, beliau mengatakan bahwa :

"Kalau pengawasan yang kami lakukan sudah merata dalam cakupan untuk Kota Watampone, namun kalau untuk cakupan kecamatan-kecamatan itu kami belum merata pelaksanaannya karena terbatasnya sumber daya tenaga kesehatan kami yang tidak sejalan dengan luas daerah Kabupaten Bone".

Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Drs. Ridwan Samad selaku Tokoh Masyarakat sekaligus selaku orang tua salah seorang pedagang campuran di Pompanua wawancara dengan beliau mengatakan bahwa :

"Dinas Kesehatan Kabupaten Bone tetap mengadakan sistem pengawasan baik berupa penyuluhan atau sosialisai akan tetapi masih ada juga masyarakat yang tidak dijangkau informasi itu".

Ditambahkan lagi oleh Pemilik Apotek atas nama Ahmad dengan petikan wawancara sebagai berikut :

"Akhir-akhir ini pengawasan peredaran obat dan makanan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sebatas di wilayah situ-situ saja, maksudnya monoton di dalam kota saja belum merata, padahal masih banyak daerah-daerah di beberapa kecamatan yang membutuhkan komunikasi, informasi dan edukasi dari dinas terkait berhubungan dengan peredaran obat dan makanan itu".

Sesuai dengan penjelasan indikator dan hasil petikan wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pengawasan peredaran obat dan makanan yang dilakukan selama empat kali dalam setahun tersebut tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone hanya saja belum merata dan menjangkau terhadap seluruh daerah di Kabupaten Bone. Hal ini dikarenakan faktor keterbatasan tenaga kesehatan yang terbatas yang tidak sesuai dengan cakupan wilayah Kabupaten Bone. Dengan demikian pengawasan peredaran obat dan makanan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone belum optimal dan efektif selama ini.

Akurat

Sistem pengawasan harus menggunakan dan memberikan informasi yang

akurat. Adapun indikator yang mempengaruhi akurat bisa dilihat dari tepat sasarannya, kelengkapan dan tepat sasaran.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang pedagang campuran atas nama Aris Kadir, beliau mengatakan bahwa :

"Sebenarnya pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sudah tepat pada sasaran tetapi tidak merata pada pelaksanaannya". Buktinya saya bersama sejumlah pedagang campuran lainnya yang mengalami kerugian akibat dampak dari pada pengawasan obat dan makanan yang tidak merata oleh Dinas Kesehatan tersebut".

Selain itu juga dijelaskan pula oleh pedagang campuran atas nama Haris Kamhas, berikut petikan wawancara dengan beliau :

"Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan sudah tepat sasaran, akan tetapi belum menjangkau ke seluruh sarana penjualan obat dan makanan yang ada". Hal inilah yang berdampak pada kami akibat pengawasan obat dan makanan yang tidak merata sehingga kami dirugikan".

Ditambahkan lagi oleh Tokoh Remaja Taufan Arnas dengan petikan wawancara beliau mengatakan bahwa :

"Kalau masalah lengkap dan mudah dipahami sistem pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone itu dari prosedur di sana memang sudah lengkap, tapi yang menjadi kendala di sini sosialisasi atau penyuluhan itu jarang dilakukan oleh mereka. Padahal masih banyak di pelosok daerah yang tidak pernah sama sekali dijangkau terlebih pengetahuan dan pemahaman masyarakat setempat yang minim".

Diperjelas lagi oleh Pemilik Apotek atas nama Ahmad dengan petikan wawancara sebagai berikut :

"Sebenarnya kami selaku penyedia sarana penjualan untuk konsumen itu hanya sebatas menjual saja berdasarkan aturan yang berlaku, selebihnya itu menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Bone untuk melaksakan tugas pemerintahan bidang pengawasan obat dan makanan. Tapi memang masih ada saja oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab seperti misalnya memperjualbelikan obat-obatan yang tanpa resep dokter kepada konsumen".

Sesuai dengan penjelasan pada indikator dan petikan wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan peredaran obat dan makanan sebenarnya sudah tepat pada sasaran yang dituju, namun demikian masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi terkait dengan pemerataan pelaksanaan kegiataan yang seharusnya menyeluruh dan merata pada segenap produsen, distributor, maupun konsumen yang lebih baik lagi ke depan.

Tepat Waktu

Informasi yang dilibatkan kepada sistem pengawasan harus tepat waktu.Adapun indikator yang mempengaruhi ketepatan waktu yaitu konsisten.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, beliau mengatakan bahwa :

"Mekanisme pengawasannya itu tiap triwulan. Kegiatan kami laksanakan selama empat kali dalam setahun, kami turun ke lapangan dan itu kegiatan rutin sesuai dengan yang terdapat dalam daftar isian pengawasan peredaran obat dan makanan. Tapi kalau masalah merata itu belum bisa kami lakukan karena sumber daya tenaga kesehatan kami terbatas tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Bone ini ditambah dengan akses jalan yang sulit dijangkau".

Sama halnya dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, beliau mengatakan bahwa :

"Untuk masalah waktu pelaksanaan kegiatannya itu kami rutin setiap tahunnya. Pengawasan di sini itu dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun dengan pengawasan pada sarana-sarana yang berbeda. Jadi untuk pelaksanaannya itu selama ini kami memang rutin mengadakan tapi belum menyeluruh ke semua wilayah di Kabupaten Bone ini karena jumlah tenaga sumber daya kesehatan kami itu masih terbatas, jadi belum bisa merata. Tapi kalau pengawasan untuk tingkat Kota Watampone itu secara umum sudah merata".

Berbeda halnya dengan apa yang dikemukakan seorang pedagang campuran oleh Haris Kamhas, berikut petikan wawancara dengan yang bersangkutan mengatakan bahwa :

"Pengawasan peredaran obat dan makanan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang dilakukan secara berkala masih belum konsisten dalam pelaksanaanya. Terkadang dilaksanakan terkadang juga tidak dilaksanakan.

Sering terlambat sering juga lebih cepat dari waktu yang ditentukan".

Dipertegas lagi melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Drs. Ridwan Samad selaku Tokoh Masyarakat beliau mengatakan bahwa :

"Pengawasan peredaran obat dan makanan tetap dilakukan oleh dinas terkait hanya saja tidak konsisten. Kegiatan sosialisai dan penyuluhan yang kurang atau jarang dilakukan sehingga tidak heran kalau ada berbagai masalah yang ditimbulkan".

Sesuai dengan penjelasan indikator dan petikan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bone tetap mengadakan pengawasan peredaran obat dan makanan secara rutin namun demikian tidak tepat pada waktu pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan prosedur atau aturan yang ada sehingga wajar kalau ada berbagai persoalan yang terjadi dan merugikan sejumlah pihak tertentu.

Fleksibel

Sistem pengawasan harus fleksibel sehingga dapat mengakomodasikan perubahan-perubahan dan penyesuaian. Adapun indikator yang mempengaruhi fleksibilitas antara lain cepat tanggap dan mampu memberikan solusi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan, beliau mengatakan bahwa :

"Kalau responnya itu kami sangat merespon, contohnya misalkan adanya laporan seperti kemarin itu ada laporan terkait manakan yang mengandung cacing di sinjai. Sebelum kami turun ke lapangan kami terlebih dahulu berkoordinasi dengan orang kami di sana, mencari tahu benar tidaknya informasi yang ada itu serta apa penyebabnya. Jadi apabila ada hal semacam itu koordinasi dulu dengan yang di sana kemudian kami konsultasi dengan Balai POM. Apabila ada konfirmasi dari Balai POM tersebut bahwa tindak lanjut persoalan itu maka kami tindak lanjuti".

Bertolak belakang dengan wawancara dengan Taufan Arnas selaku kakak kandung dari pada siswa yang mengalami insiden akibat pengaruh mengkonsumsi obat-obatan yang terbilang dosis tinggi, berikut petikan wawancaranya

"Kejadian yang telah menimpa saudara/almarhum adik saya kemarin itu termasuk salah satu dampak dari pada tingkat pengawasan yang rendah dan tidak ketat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone terlebih respon yang kurang dalam menanggapi dan menyelesaikan persoalan yang terjadi terkait dengan tingkat penyalahgunaan obat-obatan tanpa resep dokter yang semakin menyebar luas di kalangan remaja bahkan anak sekolah sampai saat ini".

Selain itu ditambahkan lagi oleh salah seorang remaja atas nama Yusuf, termasuk pengguna yang sering mengkonsumsi obat-obatan yang tergolong dosis tinggi yang diperoleh dari apotek-apotek terdekat, berikut petikan wawancara dengan yang bersangkutan :

"Saya bersama teman-teman saya sering sekali mengkonsumsi obat-obatan seperti dextro, tramadol, bodrex, konidin dengan cara meracik atau mencampur semua obat itu dalam satu wadah (botol) kemudian diminum. Sejumlah obat itu saya beli di beberapa apotik dengan mudah tanpa adanya resep dokter".

Untuk persoalan pemberian solusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, beliau mengatakan bahwa :

"Kami di sini terbuka dalam hal menerima kritik dan saran, dalam artian bahwa segala bentuk koreksi dan masukan dari berbagai pihak kepada kami itu segera kami lakukan evaluasi dan perbaikan sehingga ke depan kami akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Kami juga tetap memberikan solusi terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi berhubungan peredaran dengan obat dan makanan dan lain-lain".

Berbeda halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Haris Kamhas seorang pedagang campuran yang telah disebutkan sebelumnya, berikut petikan wawancara dengan yang bersangkutan :

"Kejadian kemarin yang telah menimpa kami selaku pedagang campuran setelah beberapa bulan kami menjalani proses hukuman, setelah itu tindak lanjutnya tidak ada dari Dinas Kesehatan, bahwa seperti apa sih sebenarnya masalah ini, ini masalah mau di bawa kemana sih sebenarnya, masa sampai di situ saja".

Sesuai penjelasan indikator diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang tingkat pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone masih belum optimal dan ketat dilaksanakan. Hal ini berdampak pada penyalahgunaan obat yang pada akhirnya menimbulkan kerugian yang mendalam. Semoga saja ke depan hal ini tidak terulang

kembali. Oleh karena itu dinas terkait harus siap sedian dan cepat tanggap dalam merespon, menyelesaikan berbagai persoalan ada sehingga segala bentuk pelanggaran atau kegiatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku dapat segera diatasi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone tetap terbuka dan menerima berbagai aduan maupun keluhan yang ada terkait dengan peredaran obat dan makanan. Hal ini dilihat dari kasus penangkapan sejumlah pedagang campuran yang terjadi akibat dari pada tingkat pengawasan yang tidak efektif dilakukan itu merugikan sejumlah pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan hasil uraian yang melalui serangkaian kegiatan hasil observasi dan wawancara di atas bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bone masih belum efektif dalam pengawasan peredaran obat dan makanan yang dilakukan. Hal ini dilihat dari tingkat pengawasan yang rendah, tidak merata, dan konsisten terlebih terbatasnya sumber daya tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan luas cakupan wilayah Kabupaten Bone sehingga pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan-persoalan yang ada.

PEMBAHASAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone selaku penanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sudah seharusnya akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya mengantisipasi penyalahgunaan peredaran obat dan makanan yang berbahaya tersebut agar produsen, distributor, dan pelaku usaha selalu terjaga dalam kondisi yang sehat dan aman dari segala bentuk pelanggaran yang ada, baik peredaran maupun penyalahgunaan obat dan makanan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut.

Oleh karena itu pengawasan obat dan makanan harus efektif dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi hal yang bisa merugikan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat sejauh mana efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten Bone terhadap penjualan obat dan makanan khususnya di Kecamatan Ajangale.

Berbicara mengenai efektifitas berarti menunjukkan sampai seberapa jauh tercapai suatu tujuan yang telah terlebih dahulu ditentukan (Rahadhitya & Darsono 2015). Selain itu efektivitas menurut Siagian (2014) mengartikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Selain itu keberhasilan suatu organisasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatannya besar kecilnya dipengaruhi oleh pengawasan atau pemantauan yang seoptimal dan seefektif mungkin yang dilakukan oleh internal organisasi (direktur, manajer, atau pimpinan) di dalam organisasi, begitupun eksternal organisasi (masyarakat umum) di luar organisasi.

Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi (Fahmi 2013). Selain itu menururt (Handoko 2013) pengawasan berarti para manajer berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Bila beberapa bagian organisasi ada pada jalur yang salah, manajer harus membetulkannya.

Pendapat yang selanjutnya yang dikemukakan oleh George R.Terry (2006), mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Siagian (2014), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan.Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Titik berat pengawasan seseungguhnya berkisar pada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau badan organisasi yang bersangkutan. Oleh karenanya efektivitas pengawasan sangatlah penting dan besar pengaruhnya untuk dilakukan dan ditingkatkan oleh setiap organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

Pembahasan penelitian ini mengacu pada teori Kreitner (Harahap 2015), maka efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone meliputi integrasi, objektif, akurat, tepat waktu dan fleksibel, yang sentral terhadap pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bone, baik di apotek, maupun toko-toko pelaku usaha yang ada. Sebagaimana yang disebutkan dalam teori Kreitner (Harahap 2015), bahwa pengawasan efektif jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Integrasi

Merupakan suatu sistem yang digunakan dalam membangun dan menjalin koordinasi maupun komunikasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses kegiatan suatu badan atau organisasi dengan menerapkan prinsip kerja sama atau bersinergi dalam setiap pelaksanaannya sehingga sistem pengawasan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Integrasi memiliki sinonim dengan perpaduan, penyatuan, ataupenggabungan, dari dua objek atau lebih. Menurut pendapat Integrasi menurut Sanusi adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecahbelah dan bercerai berai dimana Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan mesra antara anggota kesatuan itu.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam hal integrase sudah baik namun demikian belum merata dalam pelaksanaannya. Hal ini dilihat dari keluhan sejumlah masyarakat bahkan pelaku usaha yang kemudian dirugikan akibat komunikasi, edukasi, maupun informasi yang belum optimal sehingga perlunya evaluasi dan perbaikan untuk dilakukan oleh dinas terkait, agar tercipta integrase yang baik.

2. Objektif

Objektif dalam hal ini yaitu sistem pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh, adil dan merata terhadap semua komponen yang diawasi. Semakin merata pengawasan yang dilakukan semakin baik pula hasil yang dicapai nantinya demikian pula sebaliknya. Adapun pengertian objektivitas menurut Lawrence B. Swyer, mortimer A. Dittenhofer dan James H. Scheiner adalah suatu hal yang langka dan hendaknya tidak dikompromikan.

Selain itu pengertian objektivitas menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010) adalah :

"Harus bebas dari masalah benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang dketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain.

Proses pengawasan yang dillakukan oleh Dinas Kesehatan dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone harus bersifat objektif, tidak diskriminasi dan adil, sehingga tercipta pengawasan yang lebih optimal kedepannya.

3. Akurat

Akurat merupakan mekanisme yang handal dalam sistem pengawasan dalam suatu organisasi yang bilamana dilakukan dengan tepat pada sasaran yang dituju serta lengkap dan mudah dipahami oleh sasaran yang dituju maka tentunya sistem pengawasan yang dilakukan akan sangat baik hasilnya demikian sebaliknya.

Dalam mengumpulkan data perlu keakuratan , dimana akurasi data menjadi hal yang penting dalam pengambilan kebijakan. Terlebih dalam hal melakukan suatu pengawasan harus dijalankan dengan data yang akurat, sehingga dalam pengevaluasian data dalam hal pengawasan bisa lebih dimaksimalkan.

Pelaksanaan pengawasan peredaran obat dan makanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sudah tepat sasaran, namun masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi terkait dengan pemerataan pelaksanaan kegiataan yang seharusnya menyeluruh dan merata pada segenap produsen, distributor, maupun konsumen sehingga pengawasan akan lebih akurat lagi ke depannya.

4. Tepat waktu

Setiap kita melakukan aktivitas sehari-hari, ketepatan waktu menjadi salah satu yang mencerminkan tingkat kedisplinan seseorang. Maksudnya, semakin seseorang sering terlambat, bisa ditebak bahwa orang tersebut kurang disiplin. Tepat waktu itu sendiri adalah mengerjakan apa yang harus kita kerjakan tepat pada waktunya. Tentu saja dengan tepat waktu kita bisa mendapatkan keuntungan tersendiri.

Dalam melakukan sistem pengawasan yang harus disertai dengan profesionalisme ketepatan waktu yang konsisten dalam setiap pelaksanaannya. Semakin konsisten ketepatan waktu dalam melakukan pengawasan maka

semakin baik hasil yang dicapai begitupun sebaliknya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone telah mengadakan pengawasan peredaran obat dan makanan secara rutin namun tidak tepat waktu dimana seharusnya dilaksanakan empat kali dalam setahun berdasarkan prosedur yang ada sehingga wajar kalau ada berbagai persoalan yang terjadi dan merugikan sejumlah pihak tertentu.

5. Fleksibel

Fleksibel merupakan pondasi yang paling utama dalam sistem pengawasan suatu organisasi karena berhubungan dengan daya tanggap dan pemberian solusi terhadap berbagai persoalan yang ada. Semakin cepat organisasi merespon dan menindak lanjuti serta memberi solusi pada permasalahan yang ada maka semakin baik hasil dari sistem pengawasan yang dilakukan tersebut begitupun sebaliknya.

Menyangkut tentang fleksibel dalam pengawasan peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone sudah terbuka dan menerima berbagai aduan maupun keluhan, namun demikian tindak lanjut untuk penyelesaian beberapa kasus yang terjadi masih sangat kurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan mengenai Efektivitas Pengawasan Dinas Kesehatan Dalam Peredaran Obat dan Makanan di Kabupaten Bone berdasarkan lima Indikator pengawasan menurut Kreitner (dalam Harahap 2015) yaitu

Integrasi

Integrasi dalam melihat efektifitas pengawasan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bone dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurang, dilihat dari proses komunikasi yang belum terintegrasi dengan baik.

Objektif

Pengawasan peredaran obat dan makanan yang dilakukan selama empat kali dalam setahun tersebut tetap dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone hanya saja belum merata dan menjangkau terhadap seluruh daerah di Kabupaten Bone. Hal ini dikarenakan faktor keterbatasan tenaga kesehatan yang terbatas yang tidak sesuai dengan cakupan wilayah Kabupaten Bone.

Akurat

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan obat dan makanan sudah tepat pada sasaran yang dituju dalam hal ini sarana-sarana penjualan yang ada di daerah Kabupaten Bone, namun demikian secara keseluruhan belum merata dan terjangkau di beberapa daerah tertentu selain itu prosedur di sana memang sudah lengkap namun yang menjadi kendala yakni sosialisasi atau penyuluhan yang jarang dilakukan oleh dinas terkait. Padahal masih banyak di pelosok daerah yang tidak pernah sama sekali tersentuh atau dijangkau terlebih penduduk setempat yang terbilang usia lanjut mengingat pengetahuan dan pemahaman mereka yang sangat minim.

Tepat waktu

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone tetap mengadakan pengawasan peredaran obat dan makanan secara rutin namun demikian tidak tepat pada waktu pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan prosedur atau aturan yang ada sehingga wajar kalau ada berbagai persoalan yang terjadi dan merugikan sejumlah pihak tertentu.

Fleksibel

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone tetap terbuka dan menerima berbagai aduan maupun keluhan yang ada terkait dengan peredaran obat dan makanan, namun demikian berdasarkan persoalan yang disebutkan di atas maka dinas terkait dalam hal ini tindak lanjut untuk penyelesaian beberapa kasus yang terjadi masih sangat kurang.

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan dalam peredaran obat dan makanan di Kabupaten Bone yaitu :

1. Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya sekiranya dapat meningkatkan tanggung jawab akan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pemerintahan bidang pengawasan obat dan makanan ke arah yang lebih baik lagi ke depan.
2. Koordinasi yang baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone antar lintas sektor yang terlibat dalam pengawasan obat dan makanan.
3. Komunikasi, informasi dan edukasi dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan yang lebih baik lagi ke depan.
4. Pemerintah daerah setempat terlebih Dinas Kesehatan Kabupaten Bone harus mampu menyaring semua aspirasi baik itu kritikan maupun masukan dari masyarakat sehingga

pengawasan obat dan makanan dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

Ely Suhayati., & Siti Kurnia Rahayu. (2010). AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemriksaan Akuntan Publik. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Fahmi, Irham. 2013. Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya. Bandung : Alfabeta

Handoko, 2013, Manajemen; Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas. Yogjakarta : BPFE

Harahap, Sofyan Syafri. 2015. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.

Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014.Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3.

Moleong J Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya

Moleong J Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.

Rahadhitya, Rheza, And Darsono Darsono. 2015. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Audit Internal (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah). Diss. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis

R.Terry, George. 2006. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara

Siagian, Sondang. P. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: BumiAksara..

Sugiyono.2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta